

## **SKRIPSI**



# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DUI' MENRE (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS**

**OLEH:**

**A.MEGA HUTAMI ADININGSIH**

**B 111 12 190**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DUI' MENRE  
(UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH:**

**A.MEGA HUTAMI ADININGSIH**

**B 111 12 190**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DUI' MENRE* (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS

Disusun dan diajukan oleh

**A. MEGA HUTAMI ADININGSIH**

**B111 12 190**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof. Dr. Andi Suriyaman M. P., S.H., M.Hum.  
NIP. 19690727 199802 2 001

Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Fandi Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa:

Nama : A. Mega Hutami Adiningsih

Nomor Pokok : B 111 12 190

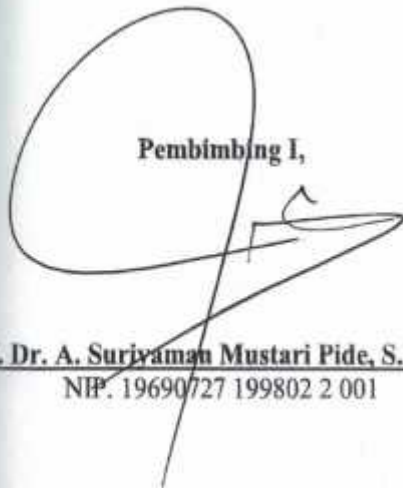
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DUI'*  
*MENRE* (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN  
ADAT SUKU BUGIS.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi.

Makassar, 7 Agustus 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H  
NIP. 19690727 199802 2 001

Pembimbing II,



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI MEGAH HUTAMI ADININGSIH**

No. Pokok : B111 12 190

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dui' Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2016



dan Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

**Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**

NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**A.MEGA HUTAMI ADININGSIH (B111 12 190), TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DUI' MENRE DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS,** di bawah bimbingan A. Suriyaman Mustrari Pide selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta dampak hukum *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba.

Untuk mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian melalui pendekatan historis, komparasi, dan penelitian kepustakaan serta penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan yang relevan dengan masalah yang diteliti mengenai pemberian *Dui' menre*. Penelitian melalui teknik wawancara dimana responden dipilih dengan cara purposive. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriwawo dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat bugis khususnya di Kabuapten Soppeng dan Kabupeten Bulukumba menganggap bahwa pemberian *Dui' menre* adalah tradisi pemberian uang yang wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu praa syarat, karena jika tidak ada *Dui' menre* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *Dui' menre* akan tetapi hukumnya mubah. Islam tidak melarang pemberian *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *Dui' menre* tidak bertentangan dengan syri'at dan penentuan nilai *Dui' menre* tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Adapun dampak dari tingginya penentuan jumlah *Dui' menre* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, banyak laki-laki yang enggan menikah, banyak perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja menghamili perempuan yang ingin dinikahi.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta skripsi ini.

Shalawat serta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad saw yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridhaNya, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, bapak tercinta Nur Alam, S.H., M.H. yang menjadi penyemangat hidup dan motivator terbesar penulis serta tetap setia membantu pada setiap kesusahan penulis serta mama tercinta A. Zuraedah yang telah melahirkan dan dengan penuh kasih membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih atas segala doa, nasehat, pengorbanan, cinta dan kasih sayang kepada penulis selama ini. Semoga Allah swt memberikan kemampuan lebih kepada penulis untuk membalas semua jasa yang telah kalian berikan. Amin.

Kepada saudari tersayang A. Bayu Rosari Ayuningsih yang juga menjadi kakak satu-satunya terima kasih atas semua

dukungannya selama ini kepada penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya.

Kepada Muh. Fajrin Maramis Fauzi, penulis ucapkan terima kasih atas segala motivasi, inspirasi, cinta dan dukungan serta doanya selama ini. Terima kasih atas segala waktu dan telah bersedia berbagi suka maupun duka bersama penulis.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Dui’ Menre* (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada ibu Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. ,



ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. , serta bapak M. Ramli Rahim, S.H., M.H. atas kesediaannya selaku dosen penguji skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama dalam masa studi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsinya banyak pihak-pihak yang membantu penulis. Pada kesempatan ini,perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. , Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. , serta Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhammad Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis dan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga kepada penulis.

5. Seluruh staf akademik, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah membantu penulis selama masa studinya.
6. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag., M.H. , staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Hj. Andi Murni selaku salah satu Tokoh Adat Kabupaten Soppeng yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dalam membantu kelancaran penelitian dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat- sahabat yang terkasih Masyita, Pio, Ainun, A.Wafiyyah, A.Nila, Shary, Vina, Dido, Dian Martin, Puthe, Olivia, Widi, Olivin, terima kasih untuk segala dukungan dan semangat yang tetap setia menemani baik dalam sedih maupun senang penulis.
8. Keluarga besar BSDK FH-UH terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis selama masa studinya yang tidak dapat disebutkan satu-per satu. Terima

kasih atas semua bantuannya baik moril maupun materil, semoga penulis diberi kesempatan untuk membalas jasa-jasa kalian dan semoga Allah swt memberkahi kita semua di setiap langkah kehidupan kita. Amin.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini member manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keperdataan.

Makassar, 7 Agustus 2016

**A. Mega Hutami Adiningsih**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	8
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	13
C. Tujuan,Rukun dan Syarat Perkawinan .....	19
D. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....	27
E. Macam-Macam, Bentuk dan Nilai Mahar .....	30
F. Pelaksanaan Pemberian Mahar.....	37

G. Sejarah <i>Dui' Menre</i> dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar .....	39
H. Pengertian Sompas dan <i>Dui' Menre</i> , serta Perbedaannya dengan Mahar .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Jenis dan Sumber Penelitian .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kedudukan dan akibat hukum <i>dui' menre</i> dalam perkawinan adat Bugis.....	49
B. Tinjauan hukum Islam tentang <i>dui' menre</i> dalam perkawinan adat Bugis.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang baik bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya saja sehingga menjadi penyebab masalah.

Dalam syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula halnya dengan perkawinan. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi.

Dalam hukum perkawinan, terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan rukun dan syarat perkawinan. Ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada 4, yaitu (1) akad (ijab dan qabul), (2) kedua calon mempelai, (3) saksi, (4) dua orang yang

melakukan akad (wali dan calon suami). Adapula penjelasan dari ulama lain yang mengatakan bahwa rukun perkawinan ada 5, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) mahar, (5) akad.

Namun unsur pokok suatu perkawinan secara lengkap adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta Ijab dan Qabul.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk kedalam syarat perkawinan.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*, Rajawaliipress, Jakarta, 2009, hal.

Perkawinan adat dalam suku Bugis disebut *pa'bungtingan*. Upacara *pa'bungtingan* banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah dari Tuhan.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilakukan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Diantaranya adalah *A'jagang-jagang/Ma'manu-manu*, *A'suro/Massuro*, dan *Appa'nasa/Patenre Ada*. *A'jagang-jagang* adalah penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. *A'suro* adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Appa'nasa* yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari perkawinan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis biasa disebut *Dui' Menre*.

Saat ini, pemahaman sebagian besar masyarakat suku Bugis tentang pengertian mahar dan *dui' menre* masih banyak yang keliru. Masih ada segelintir orang yang menyamakan kedudukan mahar dan *dui' menre*, namun adapula yang membedakannya.

Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui'menre'* (Bugis) atau *uang panaik/doe' balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut



ajaran Islam. Sedangkan *dui'menre'* atau *uang panaik/doe'balanja* adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.<sup>2</sup>

Pengertian dari sompa atau mahar dengan uang panaik memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Sompa atau mahar merupakan kewajiban yang ada dalam Islam, sedangkan *dui' menre* merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat.

Kenyataannya *dui' menre* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah uang panaik yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda yang gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi jumlah *dui' menre*. Bahkan yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari atau masyarakat suku Bugis menyebutnya *silariang*.

Penyebab tingginya jumlah *dui' menre* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah status sosial calon isteri serta tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon isteri.

---

<sup>2</sup> Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, “Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Vol. 6, Nomor 27 April 2015, hlm. 82

Dalam hal ini, jumlah *duit menre* yang merupakan kewajiban adat masyarakat Bugis dapat mencapai ratusan juta rupiah. Sebaliknya mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak dipermasalahkan. Jumlahnya tergantung kerelaan calon suami. Hal ini sesuai dengan hadits tentang mahar, diantaranya adalah:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda *“Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang bermahar sedikit.”* (mukhtashar sunan Abu Daud)<sup>3</sup>

Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya di antara tanda-tanda berkah perempuan adalah mudah dilamar, murah maharnya, dan murah rahimnya.”* (HR.Ahmad)<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *duit menre*. Kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Tentang *“Duit Menre”* (uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis.”

---

<sup>3</sup> Nikah Dalam Islam Ayat dan Hadist Tentang Mahar, <http://nikah-dalam-islam.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2016, pukul 16.17 Wita.

<sup>4</sup> Mahar Itu Tanda Cinta, <http://aqlislamiccenter.com/>, diakses tanggal 20 Februari 2016, pukul 16.18 Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan serta dampak hukum *dui' menre* dalam perkawinan Adat suku Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *dui' menre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan serta dampak hukum *dui' menre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *dui' menre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *dui' menre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis.

## 2. Kegunaan Praktis:

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang mahar dan *dui' menre*, di tinjau dari segi hukum Islam. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat suku Bugis pada khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang uang panaik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>5</sup>

Ada banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Nikah atau *ziwaj* dalam Bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwih* diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Mazahibil Arba’ah* menyebutkan ada 3 macam makna nikah, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1892, hlm. 8.

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993, hlm. 1-4.

1. Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah:

“bersenggama atau bercampur.”

Selanjutnya dikatakan:

“terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.”

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama.

2. Makna ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama).

Dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Bila kita menemui kalimat nikah dalam Al-Qur'an atau hadist itu berarti *watha'* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan lain). Pengertian ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 22 dan surat Al-Baqarah ayat 230.

Pendapat kedua mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut makna lughawi (menurut bahasa).

Pengertian pendapat ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha'.

### 3. Makna Fiqh (menurut ahli Fiqh)

Nikah menurut ahli fiqh berarti : akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para Imam Madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan *Hanafiah* mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Golongan *Asy-Syafi'iyah* mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Golongan *Malikiyah* mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Golongan *Hanabilah* mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Para ulama mutaakhirin, dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri kedalam pengertian nikah. Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta member batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>7</sup>

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Maksud dan tujuan itu adalah mengharapkan keridhaan Allah SWT.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.3



Rumusan pengertian perkawinan tersebut, didasarkan pada sudut pandang agama Islam, karena perkawinan disebut juga nikah. Disamping itu ternyata untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.

Kaitannya dengan pengertian tersebut, Undang-undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, akan tetapi dari semua rumusan yang telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli, perjanjian pinjam uang, perjanjian kerja atau sewa-menyewa, akan tetapi perjanjian dalam nikah adalah

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

## **B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.<sup>10</sup>

Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai-bagai upacara lengkap dengan *sesajen-sesajennya*. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada

---

<sup>10</sup> Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (suatu Pengantar), PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 48

kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.<sup>11</sup>

Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan di akhirat.

Oleh karenanya, Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, biasa merupakan urusan pribadi bergantung susunan masyarakat. Demikian pula di ketengahkan oleh Teer Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Dan begitupula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum

---

<sup>11</sup> Soerjo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 122.

dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan diatas kemampuan manusia.<sup>12</sup>

Perkawinan dalam arti Perikatan Adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchbaarheid*).<sup>13</sup>

A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu “*rites de passage*” (=upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan

---

<sup>12</sup> Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat, <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 20.06 Wita.

<sup>13</sup> Dewi Wulansari, *op.cit.*, hal. 48

atau perubahan status dari mempelai berdua; dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara-upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami-istri; semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah melampaui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.<sup>14</sup>

Menurut M.M. Djojodigono hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “*somah*”, istilah Jawa yang artinya keluarga. Dalam *somah* ini terjadi hubungan antara suami dan istri sedemikian rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka itu disebut “suatu ketunggalan”.<sup>15</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dalam beberapa bentuk dan sistem. Diantaranya perkawinan yang bersistem patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula, diantaranya bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, dan perkawinan campuran.

Dalam hal perkawinan, di Indonesia terdapat banyak perbedaan. Ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Dari sini

---

<sup>14</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hal. 122

<sup>15</sup> Dewi Wulansari, *Loc.cit.*, hal. 48

juga terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda pula. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia ini antara lain:<sup>16</sup>

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga,suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan

---

<sup>16</sup> Suriyaman Mustari Pide , *Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Makassar, 2009, hal. 155-163.

malahan sebagai mana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

c. Perkawinan Bebas

Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keroang tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan nasional tidak mengatur hal yang demikian, yang diatur hanyalah perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarga negaraan sebagai mana yang dinyatakan dalam pasal 57 UU No. 1 1974.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara

menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan system pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

### **C. Tujuan, Rukun dan Syarat Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>17</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari uraian di atas, Imam Al-Ghazali dalam lhyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan membaginya kedalam lima tujuan, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 22.

<sup>18</sup> Soemiyati, *op.cit.*, hal. 12.



1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:<sup>20</sup>

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya;
2. Untuk '*iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* membentengi diri) dan *mubadho'ah* bias melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
4. Menyempurnakan Agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;

---

<sup>19</sup> Dewi WUlansari, *op.cit.*, hal. 24.

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hal. 18-19.

6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, member nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bias saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;

15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya menuliskan bahwa antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan di dalam pengertiannya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

#### 1. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hal. 45-64.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan,
- Mahar (maskawin),
- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Wali,
- Dua orang saksi,
- Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah ini ada empat, yaitu:

- Sighat ijab dan qabul),
- Calon pengantin perempuan,
- Calon pengantin laki-laki,

- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan:

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- Adanya wali,
- Adanya dua orang saksi,
- Dilakukan dengan sighat tertentu.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya harus dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikah sementara maupun untuk selama-lamanya.

## 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

### 1. Syarat-syarat kedua mempelai

#### a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat

#### b. Syarat-syarat pengantin calon pengantin perempuan

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab

- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
  - 3) Wanita itu tentu orangnya
  - 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
  - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- c. Syarat-syarat Ijab Kabul
- 1) Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan
  - 2) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya
  - 3) Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak orang tua dan dua orang saksi
  - 4) Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.

d. Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

e. Syarat-syarat saksi

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar

#### **D. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar**

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk beda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).<sup>22</sup>

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlsh, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*. Keseluruhan

---

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hal. 36-37.



kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.<sup>23</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>25</sup>

Secara garis besar, pengertian mahar dari berbagai penulis tidaklah berbeda. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki baik berupa barang maupun jasa ketika dilangsungkan akad nikah sebagai syarat sah nya suatu pernikahan.

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, hal. 84-85.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

<sup>25</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hal. 85.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 85.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Firman Allah:

“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu kawini sebagai pemberian yang wajib”. (Q.S. an-Nisaa' : 4)

b. “.... maka istri-istri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar yang sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangannya kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami-istri), setelah ditentukan wujud kadarnya....” . (Q.S. an-Nisaa' : 25)

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 86.

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.

#### **E. Macam-Macam, Bentuk dan Nilai Mahar**

Adapun macamnya mahar (maskawin) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Mahar musamma
- b. Mahar mitsil
- a) Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).
2. Salah satu dari suami-istri meninggal.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

---

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hal. 45-47.

- b) Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi,bude), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/bude). Apabila tidak ada, mahar mitsli itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid.

Sesungguhnya, di dalam agama tidak menentukan batas minimum dan batas maksimum maskawin. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kemampuan seseorang untuk memberi berbeda-beda. Ada yang

mampu memberi maskawin banyak, adapula yang mampu memberikan sedikit. Bahkan ada yang tidak mampu memberikan apa-apa.

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.<sup>29</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.<sup>30</sup>

Secara fiqiniyah, kalangan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 91.

<sup>31</sup> Mahar dalam Hukum Islam, <https://syulhadi.wordpress.com/my-document/islami/fiqih/mahar-dalam-hukum-islam/>., di akses pada tanggal 21 Februari 2016, pukul. 22.04 Wita.

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20 yang artinya: Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar *qinthal* maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikitpun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata?<sup>32</sup>

Kata *qinthal* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*.<sup>33</sup>

Banyak sekali nash syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batasnya minimal nilai mahar dalam bentuk nominal. Kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya. Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan baca qur'an atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

Bahkan pada masa Rasulullah SAW, kejadian dimana beberapa laki-laki yang sangat miskin ingin menikah namun tidak memiliki harta apapun. Maka mahar yang diberikan kepada calon istrinya yaitu

---

<sup>32</sup> Amir syarifuddin, *op.cit.*, hal. 93.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 93

diantaranya sepasang sandal, hafalan Qur'an, bahkan ada pula yang memberikan mahar tidak dalam bentuk apa-apa.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:<sup>34</sup>

*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu.*

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsl*.<sup>35</sup>

Pangkal silang pendapat ini menurut Ibnu Rusyd, terjadi karena dua hal, yaitu:<sup>36</sup>

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak,

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.91

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 91

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hal. 42-42.

seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had. Sedangkan ulama



Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:<sup>37</sup>

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Menurut pendapat para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar yang harus dibayar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal.

Intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Bagi yang tidak mempunyai

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 94-95.

kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar sebaiknya jangan terlalu dipaksakan karena sesungguhnya dalam Islam, pemberian mahar tergantung kerelaan calon suami dan tidak memberatkan. Hal ini jangan sampai membawa dampak negative bagi para calon mempelai.

Dan untuk menghindari persengketaan dikemudian hari antara suami istri, maka sebaiknya dalam akad nikah sudah disebutkan jumlah dan bentuk mahar, baik akan dibayar seketika maupun ditangguhkan. Hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah sunnat.

#### **F. Pelaksanaan Pemberian Mahar**

Pembayaran mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, dalam hal itu apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Maka yang belum dibayar kontan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu sesuai dengan perjanjian. Jika calon mempelai perempuan rela menghapuskan hutang itu dan tidak menuntut pembayaran sebesar apa yang telah dihapuskan itu, maka lunaslah dia.<sup>38</sup>

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang

---

<sup>38</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hal. 87

keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Akan tetapi memberikan mahar pada saat dilangsungkan akad lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Wajib memberikan maskawin karena 3 perkara, yaitu:<sup>40</sup>

1. Menentukan seorang laki-laki akan maskawin akan dirinya (sebelum dukhul dan atas kerelaan calon istrinya);
2. Atau atas penentuan hakim akan maskawin itu;
3. Atau karena mendukhul si laki-laki pada istrinya, maka wajib maskawin yang lumrah (yang berlaku bagi umumnya wanita yang senilai dengan dia). Tidak ada bagi sedikitnya maskawin dan banyaknya batas-batas (yang ditentukan oleh syara', melainkan atas adat).

Dengan demikian seorang perempuan telah menjadi istrinya apabila akad-nikah telah dilaksanakan, sehingga hak istri atas mahar adalah sejak akad nikah selesai dilakukan.

---

<sup>39</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hal. 44

<sup>40</sup> Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1983, hal. 169-170.

Si istri berhak atas mahar seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila antara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka hak istri atas mahar hanya separuhnya saja. Hal ini dapat kita lihat pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 20-21.<sup>41</sup>

Apabila terjadi kematian salah satu pihak, suami atau istri sebelum bercampur, mahar itupun tetap harus dibayar. Seandainya si suami yang meninggal maka pembayaran mahar itu diambil dari harta peninggalannya sebagai pelunasan hutang. Apabila si istri yang meninggal maka hanya mahar harus dipenuhi oleh suami dan merupakan dari harta peninggalan si istri.<sup>42</sup>

### **G. Sejarah Dui' Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar**

Simbolik *Dui' Menre* atau uang panaik adalah simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya untuk suku Bugis.<sup>43</sup>

Sejarah awal uang panaik bermula pada masa kerajaan Gowa-Tallo dan Bone. Apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan keluarga bangsawan atau keturunan raja maka mempelai laki-laki harus mempersiapkan sajian berupa *dui' menre*, sompa, dan erang-erang yang megah untuk membuktikan kemampuan laki-laki dalam

---

<sup>41</sup> Soemiyati, *op.cit.*, hal. 58.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 59

<sup>43</sup> Uang Panaik, <http://amrianihamzah.blogspot.co.id/2014/12/uang-panai.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015, pukul 11.51 Wita.

memberikan kemakmuran kepada istri dan anaknya kelak. Namun, dari zaman ke zaman adat *dui' menre* mulai beradaptasi terus kebawah lapisan kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya saat ini dijadikan syarat mutlak dalam adat pernikahan Bugis-Makassar-Mandar.<sup>44</sup>

#### **H. Pengertian Sompas dan Dui' Menre, serta Perbedaannya dengan Mahar**

Budaya perkawinan pada tiap-tiap daerah tentu memiliki perbedaan dan memiliki keunikan yang sangat menarik untuk dibahas. Karena yang terjadi dalam perkawinan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu ada nilai-nilai yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi, serta nilai budaya.

Inti dari perkawinan Bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubung karena perkawinan pertama selalu diliputi dengan manusia kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial pengantin wanita.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Adat Uang Panaik Dalam Pernikahan Mandar, <http://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015, pukul 11.52 Wita.

<sup>45</sup> Susan Bolyard Miliar, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya*, Inninawa, Makassar, 2009, hal.

Di Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan bagian dari mahar atau maskawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam perkawinan yang akan diadakan yaitu uang naik atau oleh masyarakat Bugis Makassar disebut *sompa* atau *sunreng* dan *dui' menre'* (Bugis) atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki baik berupa barang maupun jasa ketika dilaksanakan akad nikah sebagai syarat sah nya suatu pernikahan.

*Sompa* secara harafiah berarti “persembahan” yang sekarang di simbolkan dengan sejumlah uang *rell'a'* (yakni *rial*, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella'* di tetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya.<sup>46</sup>

*Sompa* dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai perempuan. Di sini penting diingat bahwa calon mempelai perempuan tidak pernah menerima mahar yang lebih rendah dari jumlah yang dulu diterima ibunya. Bagi kebanyakan orang, hal ini tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasanya menerima mahar status orang kebanyakan yang sama nilainya. Namun

---

<sup>46</sup> Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, Jakarta, 2006, hal. 180.

demikian, bagi kalangan bangsawan dan orang terpandang, mereka sangat memerhatikan besaran jumlah uang serahan ini, karena menjadi symbol perpanjangan status sosial mereka. Oleh sebab itu, mahar selalu diumumkan dan dibayarkan lunas dalam upacara akad nikah.<sup>47</sup>

Di jaman lampau, *sompa* atau *sunreng* menurut derajat sosial si gadis yang dipinang itu, diperhitungkan dengan amat teliti, karena sangat menyangkut tentang status sosial keluarga. Garis-garis besar perhitungan *sompa/sunreng* juga diikuti sampai sekarang, walaupun tidak seteliti di masa dahulu. Adapun tingkat *sompa/sunreng* agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun di Tana Bugis, yang berlaku di TellumpoccoE (Bone, Wajo, dan Soppeng), yang menjadi pola ikutan bagi semua negeri-negeri Bugis.<sup>48</sup>

Sedangkan *dui' menre'* atau *uang panaik* adalah "uang antaran" pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya *dui' menre'* ditentukan oleh keluarga perempuan.<sup>49</sup>

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda.

---

<sup>47</sup> Susan Boliyard Miliar, *Loc.cit.*

<sup>48</sup> Mattulada, *Latoa*, Hasanuddin Universitypress, Ujung Pandang, 1995, hal. 47

<sup>49</sup> Christian Pelras, *Loc.cit.*

Pemberian Mahar diserahkan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan yang bersangkutan yang telah ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Sedangkan *sompa* dan *dui' menre* sebetulnya berbeda dengan Mahar dalam ajaran Islam.

*Sompa* itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang. *Sompa* itu biasanya dihitung dengan nilai *rella'* (real), dahulu dihitung dengan nilai nominal F. 2,- (dua gulden zaman Hindia Belanda). Beberapa kejadian terakhir, 1 real diberi nominal Rp.100,- sampai Rp.150,-. Maskawin yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-benda pusaka lainnya.<sup>50</sup>

Lain halnya dengan *dui' menre'* yaitu uang yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan untuk melaksanakan pesta perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahar atau mas kawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *sompa/sunreng* dan *dui' menre/uang panaik* adalah kewajiban menurut adat kepercayaan masyarakat setempat. Ketiga istilah tersebut tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal jumlah, kegunaan dan pemegang ketiganya.

Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp.10.000 sampai jutaan. Mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti

---

<sup>50</sup> Mattulada, *Loc.cit.*



emas dan tanah.<sup>51</sup> Sedangkan untuk sompa, tingkatan dan jumlahnya adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Sompa bocco, diberikan kepada raja-raja perepmpuan (Bone, Wajo, dan Soppeng) yang memegang kekuasaan kerajaan. Jumlah sunreng, 14 kati doi lama. Nilai nominal 1 kayi doi lama = 88 real + 8 oang + 8 doi'. Bersama itu diserahkan pula seorang ata dan seekor kerbau.
- b. Sompa ana'bocco, diberikan kepada putri-putri (darah penuh) dari tiga Raja Tellumpocco atau bangsawan tinggi lainnya. Jumlah maharnya ialah 7 kati doi' lama.
- c. Sompa kati, diberikan kepada putri raja-raja bawahan. Jumlahnya 1 kati doi' lama atau 88 real + 8 oang + 8 doi' lama. Bersama itu seorang ata.
- d. Sompa ana'mattola, diberikan kepada putri-putri ana'mattola. Jumlahnya 3 kati doi' lama.
- e. Sompa ana'rajeng, diberikan kepada anak-anak rajengg. Jumlah maharnya 2 kati doi'lama.
- f. Sompa cera'sawi, untuk puti-putri ana'sawi (Wajo), kira-kira sama dengan putri-putri anakarung sipue (Bone), jumlah maharnya satu kati doi'lama.

---

<sup>51</sup>Adat Uang Panaik dalam Pernikahan Mandar, <http://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar/>, diakses tanggal 26 Februari 2016, pukul 11.51 Wita.

<sup>52</sup> Mattulada, *op.cit.*, hal. 47-48

- g. Sompau tau deceng, untuk puteri-puteri tau maredaka, golongan tau deceng, jumlah maharnya  $\frac{1}{2}$  kati doi' lama.
- h. Sompau tau sama', untuk puteri-puteri tau maredaka golongan tau-sama', jumlah maharnya  $\frac{1}{4}$  kati doi' lama.

Sedangkan untuk *doi' menre* jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah mahar. Saat ini biasanya jumlah uang panai berkisar antara 20 jt hingga ratusan jt tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat negosiasi.

Tolok ukur tingginya *doi' menre* disebabkan beberapa faktor, seperti:<sup>53</sup>

- 1) Status sosial keluarga perempuan apa ia dari keluarga bangsawan atau tidak. Namun, untuk sekarang faktor ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi.
- 2) Status ekonomi keluarga pihak perempuan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula uang panai yang dipatok.
- 3) Jenjang pendidikan, besar kecilnya uang panai sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula uang panai yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai.

---

<sup>53</sup> <http://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panai-dalam-pernikahan-Mandar/>

- 4) Kondisi fisik calon istri. Yang dimaksud ialah paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja uang panai akan tetap tinggi.

Mahar dan sompa dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. *Dui' menre* dipegang oleh orang tua istri untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. Tetapi, sebagian masyarakat Bugis Makassar memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam. Padahal, seharusnya mereka lebih mengedepankan nilai kewajiban syariat Islam daripada nilai kewajiban menurut adat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba..

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai pencatat nikah/Imam, tokoh agama atau tokoh adat (orang yang dituakan), serta pihak yang terkait dengan objek yang diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu Metode penelitian wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil ber tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan atau hubungan yang dapat membantu penulis.

### **D. Analisi Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian *dui' menre* dalam perkawinan adat suku Bugis Masyarakat yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kedudukan serta Dampak Hukum Dui' Menre dalam Perkawinan Adat Bugis

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*hakikat*) yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *watha* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>54</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan.

Proses perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan

---

<sup>54</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaann prinsip Syariah dalam hukum Insonesia*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, 2010, hal 272

dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis ada tiga hukum yang mengatur yaitu hukum agama, hukum positif, dan hukum adat. Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat bugis. Dalam adat perkawinan masyarakat bugis memiliki tradisi yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Salah satu tradisi tersebut adalah adanya kewajiban memberikan *dui' menre* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat terlaksananya perkawinan. *Dui' menre* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta perkawinan dan belanja perkawinan lainnya. *Dui' menre* ini tidak terhitung sebagai mahar perkawinan, melainkan kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan

jumlah yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ke tahap selanjutnya.<sup>55</sup>

Fenomena jumlah pemberian *dui' menre* yang tinggi sehingga menghasilkan sebuah pesta perkawinan yang mewah sebenarnya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan atau golongan bangsawan, namun sekarang mengalami pergseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum Suku Bugis. Dalam hukum Islam memang tidak ada kewajiban memberikan *dui' menre*. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar sebagai bukti cinta kasih suami kepada istrinya. Sedangkan pemberian wajib *dui' menre* adalah tradisi adat bugis saja.

Pemberian *dui' menre* pada masyarakat bugis Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu tahap dalam tradisi perkawinan bugis yaitu pada tahap *mappettu ada* (lamaran). Dimana pihak laki-laki berkunjung ke tempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, jumlah mas kawin, dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan *dui' menre* yang disampaikan langsung oleh pihak perempuan. Apabila lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan jumlah *dui' menre* yang ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan yang dilamar. Terkadang terjadi proses tawar menawar sehingga mencapai

---

<sup>55</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara, Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016



kesepakatan yang di inginkan. Dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera dilangsungkan.<sup>56</sup>

Penentuan nominal *dui' menre* bagi wanita bugis beragam tergantung dari silsilah keluarga, status sosial, pendidikan, pekerjaan, umur dan lain-lain. Dapat dilihat apabila wanita tersebut keturunan bangsawan atau pendidikan dan pekerjaannya mapan, maka terkadang *dui' menre* yang harus disiapkan calon mempelai laki-laki juga harus tinggi.

Pengaruh penentuan jumlah *dui' menre* juga menjadi suatu cara untuk dapat mengangkat status sosial dalam masyarakat. Bagi pihak keluarga perempuan dapat mematok jumlah *dui' menre* yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *dui' menre* tersebut. Selain itu penentuan jumlah *dui' menre* juga merupakan penolakan lamaran secara halus sehingga tidak jadi untuk melamar. Dalam hukum adat hal ini disebut perbuatan pura-pura.

Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Bugis, memenuhi jumlah *dui' menre* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'*, jadi perempuan yang benar-benar dicintainya dapat dijadikan sebagai motivasi

---

<sup>56</sup> Hj. Andi Murni, wawancara, tokoh Adat, Kabupaten Soppeng, 25 Juli 2016

yang sangat besar untuk memenuhi jumlah *dui' menre* yang disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *dui' menre*, yang akan kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kinerjanya selama bekerja. Contohnya saat laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi permintaan *dui' menre*, umumnya untuk menebus rasa malu seorang laki-laki pergi merantau untuk bekerja dan menghasilkan uang dan kembali ke kampung halaman dengan tujuan untuk memenuhi *dui' menre* yang telah disyaratkan sebelumnya.<sup>57</sup>

Umumnya, masyarakat bugis beranggapan bahwa uang serahan yang diterima pihak pengantin perempuan sebagai uang belanja akan digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan sekaitan dengan kedatangan mempelai laki-laki. Tidak jarang mereka membelanjakan jauh lebih banyak, sehingga tambahan uang dari tamu resepsi (jumlahnya sedikit lebih kecil ketimbang uang belanja) tidak dapat menutupi biaya keseluruhan. Ketika penyelenggara pihak mempelai laki-laki menggelar resepsi yang terpisah yang merupakan rangkaian kunjungan balasan ke pengantin laki-laki, mereka mengundang sejumlah tamu yang kisarannya sama dengan jumlah undangan yang disebar pihak mempelai perempuan. Dengan demikian jumlah uang belanja menjadi

---

<sup>57</sup> Ngerinya Uang Panai' Untuk Melamar Wanita Bugis-Makassar, <https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Juli 2016, pukul 19.55 Wita.

penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah tamu yang hadir di kedua belah pihak. Sementara penyelenggara dari pihak laki-laki, yang umumnya hanya bisa menutupi tidak lebih dari setengah total biaya resepsi, telah mulai menyiapkan uang belanja dan biaya resepsi jauh sebelumnya. *Dui' menre*, dengan demikian, menjadi penanda status yang boros, bersifat pamer, dan agresif.

Pihak keluarga (saudara ayah atau ibu), memiliki pengaruh yang cukup penting dalam pengambilan keputusan mengenai besarnya *dui' menre* dan mahar. Terkadang ibu-ibu di lingkungan sekitar juga turut andil dalam penentuan jumlah *dui' menre* tersebut. Alasannya karena ibu-ibu lah yang banyak mengetahui harga bahan makanan ataupun peralatan lainnya di pasar.<sup>58</sup> Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya tidak diteruskan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak. Ironisnya bersumber dari keluarga ayah atau ibu.

*Dui' menre* memang menjadi gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena dengan adanya pertimbangan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Jika ada perkawinan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah berapa *dui' menre* nya. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa uang panaik sangat dijadikan momok penting untuk

---

<sup>58</sup> Ahmad Ridha, S.Ag, wawancara, Kepala KUA Kec.Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, 27 Juli 2016

mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi dalam kehidupan mereka.<sup>59</sup>

Salah satu contoh gengsi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat bugis yaitu jika suatu keluarga pernah melaksanakan pesta perkawinan yang megah karena memang sanggup melaksanakannya, kemudian tetangganya ingin mengadakan pesta yang mewah juga akan tetapi standar rumah dan penghasilan berbeda. Sehingga keluarga tersebut memaksakan kehendaknya untuk memenuhi keinginannya melaksanakan pesta yang mewah.

Istilah bugis yang menyangkut soal gengsi adalah "*namu metti, yaku pura toni redeh*". Artinya walaupun kering (habis), yang penting pernah masak. Maksud dari istilah tersebut adalah walaupun habis-habisan membiayai pesta perkawinan yang megah padahal hasil utang sana-sini asalkan sudah diperlihatkan.

Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *dui' menre* yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-

---

<sup>59</sup>Ahmad Ridha, S.Ag, wawancara, Kepala KUA Kec.Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, 27 Juli 2016

laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua. Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah *dui' menre* dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang bahkan menghamili perempuan yang ingin dinikahinya. Sehingga *dui' menre* tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah Bugis disebut *silariang*. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah *dui' menre* yang telah dipatok pihak keluarga perempuan sehingga perkawinannya batal, biasanya faktor lain adalah karena strata sosial laki-laki rendah disbanding strata sosial pihak keluarga perempuan yang keturunan bangsawan. Selain itu adapula dampak positif dari tingginya jumlah *dui' menre* yaitu tingginya jumlah *dui' menre* yang telah dipatok pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami istri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah.<sup>60</sup>

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang bugis tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang termasuk pembiayaan dalam perkawinan masih kurang. Dalam adat perkawinan Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa istilah pemberian yaitu

---

<sup>60</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara, Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

diantaranya adalah *sompa*, *dui' menre*, *erang-erang*, *bosara* (berisi kue-kue tradisional), *walasoji* (berisi buah-buahan), *tellu lima suku/kalisunreng* (3 buah ringgit perak), *passio' pattenre* (cincin pengikat).

*Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Bentuk *sompa* ini beragam. Di Kabupaten Bulukmba, selain uang dan emas, biasanya juga *sompanya* berupa tanah, rumah, pohon cengkeh, dan pohon kelapa (tidak termasuk tanah, hanya pohon beserta buahnya).

*Sompa* berupa tanah umumnya dijumpai pada golongan bangsawan, yang merupakan kebiasaan yang telah dipertahankan dalam perkawinan adat Bugis pada umumnya. Hal ini sekaligus melambangkan tanda kebesaran suatu kerabat dan tingkat sosial seseorang dalam hal ini menyangkut perkawinan Adat Bugis. Sedangkan *dui' menre* adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan.<sup>61</sup>

Adapun *bosara* dan *walasoji* adalah sajian-sajian berupa kue-kue tradisional dan buah-buahan yang di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak keluarga laki-laki. Kue-kue tradisioanl dan buah-buahan ini tidak hanya sekedar makanan, tapi mengandung makna tersendiri yang berupa doa-doa yang baik untuk kedua mempelai

---

<sup>61</sup> Hj. Andi Murni, wawancara, tokoh Adat, Kabupaten Soppeng, 25 Juli 2016

kedepannya. Serta *kalisunreng* dan *passio' pattenre* adalah perhiasan yang juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya.<sup>62</sup>

Di balik itu semua bukan sekedar ritual belaka, bukan sekedar pemberian saja, akan tetapi ada makna yang terkandung sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Nilai ritualnya mengandung nilai filosofis yang terkait pembelajaran. Di balik ribetnya prosesi adat perkawinan masyarakat Bugis, ada nilai doa yang terkandung. Doa dalam bentuk symbol yaitu *Tafa'ul* dalam Islam sedangkan istilah Bugisnya adalah *sennu'-sennuang*.<sup>63</sup>

Sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *dui' menre* mengandung tiga makna, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari kedudukannya *dui' menre* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba.
2. Dari segi fungsinya *dui' menre* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya resmi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

---

<sup>62</sup> Ahmad Ridha, S.Ag, wawancara, KUA Kec.Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, 27 Juli 2016

<sup>63</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara, Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

3. Dari segi tujuannya pemberian *dui' menre* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *dui' menre* yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *dui' menre* tersebut.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre dalam Perkawinan Adat Bugis**

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk Nya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun kenyatannya di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun temurun dilaksanakan.

Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh berkah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun



bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Bugis. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba memiliki tradisi tersendiri yang menyangkut tentang perkawinan. Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pemberian *dui' menre*.

Di Kabupaten Soppeng, adat yang pertama kali menyentuh masyarakatnya. Islam kemudian masuk setelah tahun 1609. Sehingga adat yang mendominasi masyarakat Bugis tapi Islam juga tetap berjalan. Islam datang tidak hampa budaya. Islam seperti saringan, Yang halus tetap jalan sedangkan yang kasar tersangkut. Artinya, tradisi yang bagus dalam adat tetap dilanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Islam yang diwajibkan adalah mahar sedangkan *dui' menre* dalam Islam

tidak diwajibkan. Dalam adat Bugis, *dui' menre* harus ada akan tetapi tidak perlu di berikan ketentuan, yang penting *sitinajae*.<sup>64</sup>

*Sitinajae* adalah istilah dalam masyarakat Bugis yang artinya sesuai atau sewajarnya. Dalam hal penentuan jumlah *dui' menre*, harus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dan tidak dipaksakan, *sitinajae*.

Pelaksanaan pemberian *dui' menre* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *dui' menre* adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan '*urf sahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.<sup>65</sup>

Mahar dan *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi *dui' menre* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya

---

<sup>64</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara, Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

<sup>65</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara, Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

proses perkawinan. Sehingga jumlah *dui' menre* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lenih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Idelanya dalam Islam *dui' menre* itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah *sompa*. Karena *sompa* adalah hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan *dui' menre* akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah *dui' menre* sama dengan jumlah *sompa* atau jumlah *sompa* lebih tinggi daripada jumlah *dui' menre*.<sup>66</sup>

Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru *dui' menre* yang tinggi sementara *sompa* nya rendah. *Dui' menre* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberap faktor, justru sebaliknya mahar atau *sompa* yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami.

Mengenai masalah tersebut di atas dalam sebuah hadist Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. melihat dari makna hadist tersebut maka jelaslah sangat tidak etis jika *dui' menre* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki lebih banyak daripada jumlah

---

<sup>66</sup> Hj. Andi Murni, wawancara, tokoh Adat, Kabupaten Soppeng, 25 Juli 2016

*sompa*. Hadist tersebut menganjurkan kepada perempuan agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *dui' menre* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajibnya dalam hukum Islam. *dui' menre* tetap ada tapi *sitinajae*.

Selama pemberian *dui' menre* tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *dui' menre* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Ada prinsip dalam masyarakat bugis yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah *dui' menre* tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. Yang pertama adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang baik, dan yang ketiga adalah menikahkan anak. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi jangan hanya mengandalkan *dui' menre*. Bahkan orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menggunkan *dui' menre* yang telah diberikan oleh pihak laki-

laki tapi *dui' menre* tersebut diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga.<sup>67</sup>

Agama Islam sebagai agama *rahmatan li alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *dui' menre* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena islam sangat menentang pemborosan. Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.

Yang menjadi tolok ukur tingginya jumlah *dui' menre* adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah *dui' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
2. Pendidikan dan pekerjaan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang dokter atau memiliki gelar S1 atau S2 maka permintaan *dui' menre* juga tinggi.

---

<sup>67</sup> H.A.Muhammad Akmal, Wawancara,Kepala KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

3. Keturunan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan maka permintaan *dui' menre* juga tinggi.
4. Strata sosial. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah *dui' menre* yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
5. Umur. Jika calon mempelai perempuan masih gadis, maka jumlah *dui' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
6. Kondisi fisik. Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang cantik, kulit putih, maka jumlah *dui' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.

Agama Islam tidak membedakan manusia satu sama lain. Tidak ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan.

Al 'adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang

disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash*
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu,

kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.

Pemberian *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang *walimah*. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.

Dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Nabi saw juga pernah mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan Ummu Salamah dengan 2 mud gandum dan juga saat menikah dengan Shafiyah dengan kurma. Dalam potongan hadist lain yang diriwayatkan Syaikhnan, Nabi saw bersabda "*berwalimahlah walaupun dengan menyembelih kambing.*" Kemudian sabda lain yang diriwayatkan Turmudzi bahwa "*perlihatkan nikah itu dan pukullah terbangannya.*"<sup>68</sup>

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah *dui' menre* untuk membiayai

---

<sup>68</sup> H. Moch. Anwar, Fiqih Islam, PT.Alma'arif, Bandung, 1983, hal 171



jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah *dui' menre* dari zaman ke zaman semakin tinggi. Karena semakin tinggi pula harga bahan pokok di pasaran maka permintaan *dui' menre* pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatar belakangi tingginya jumlah *dui' menre*.

Seperti itulah pemberian *dui' menre* di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. Pemberian *dui' menre* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur secara tertulis.

Kebanyakan masyarakat bugis Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulumba dalam menjalankan kebiasaan memberikan *dui' menre* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis.

Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara' yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
2. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
3. Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.
4. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji.
5. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.

Hukum dari pemberian *dui' menre* itu sendiri menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.<sup>69</sup>

Pemberian *dui' menre* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis khususnya

---

<sup>69</sup> H.A.Muhammad Akmal (Kepala KUA Kec. Marioriwawo), Wawancara, KUA Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, 24 Juli 2016

Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba. Walaupun pemberian *dui' menre* ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian *dui' menre* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *Dui' menre* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *Dui' menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Tingginya nilai *Dui' menre* sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah *Dui' menre* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawan tua, *silariang*, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin dinikahi.
2. Tinjauan hukum Islam tentang *Dui' menre* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Dui' menre* dalam Islam.

Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsure paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan. Yang penting dalam masyarakat bugis *sitinajae*.

## **B. Saran**

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bugis pada umumnya dan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukmba pada khususnya mengenai masalah *Dui' menre*. Sehingga tidak menganggap *Dui' menre* sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan *Dui' menre* sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga tidak menjadikan *Dui' menre* sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.
2. Jumlah pemberian *Dui' menre* seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan (*Sitinajae*). Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam datang tidak menghancurkan tradisi budaya yang

ada, adat juga tetap berjalan. Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang*, Makassar: Pelita Pusaka, 2009.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009
- Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: NALAR. Forum Jakarta-Paris, 2006
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993
- Mattulada, *Latoa*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, Bandung; PT. Alma'arif, 1983
- Rika Elvira, *"Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai)" dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Sugira Wahid, *Kearifan Adat Istiadat Makassar*, Makassar: Arus Timur, 2015
- Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, Makassar: Inninawa, 2009
- Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Vol. 6, Nomor 27 April 2015

Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat. Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawalipress, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Sumber Lain**

Adat Uang Panaik dalam Pernikahan Mandar, <http://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar/> , diakses tanggal 26 Februari 2016, pukul 11.51 Wita. Ayat dan Hadits Tentang *Mahar*, [www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com), diakses tanggal 21 Februari 2016, pukul 22.04 Wita.

Mahar Dalam Hukum Islam, <https://syulhadi.wordpress.com/my-document/islami/fiqih/mahar-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 21 Februari 2016, pukul 22.04 Wita

Mahar Itu Tanda Cinta, <http://aqlislamiccenter.com/>, diakses tanggal 20 Februari 2016, pukul 16.18 Wita.

Nikah Dalam islam Ayat dan Hadist Tentang Mahar, <http://nikah-dalam-islam.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2016, pukul 16.17 Wita.



Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat,

<http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 20.06 Wita.

Uang Panaik, <http://amrianihamzah.blogspot.co.id/2014/12/uang-panai.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015, pukul 11.51 Wita.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**  
*Alamat: Jl. Madrasah No. 211 Takglala Kab. Soppeng Tel.081342562828*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Kk.21.18.02/HM.01/160/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng menyatakan bahwa:

Nama : A. Mega Hutami Adiningsih  
No. Pokok : B11112190  
Prog. Studi : Hukum Keperdataan  
Alamat : BTN. Citra Sari Permai Blok B8/ 1

Telah melaksanakan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Marioriwawo dan mendapatkan informasi serta data, terkait dengan penyusunan skripsinya yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAIK (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR"**

Pada hari Senin 25 Juli 2016, berdasarkan Surat Nomor: 11651/UN4.5.3/PL.02/2016 dari Kemenristek dan PT. UNHAS Fakultas Hukum Makassar tanggal 21 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DR. H. A. MUH. AKMAL, S.Ag, M.HI  
NIP. 19740706 200212 1 006

Tembusan:

1. Kepala Kemenag Soppeng

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**KECAMATAN RILAU ALE**

Alamat : Jl. Pemuda No. 2 Palampang, Kode Pos 92552

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : Kk.21.21.09/2-b/22/VII/2016**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale Kab.Bulukumba, menerangkan bahwa :

Nama : A. MEGA HUTAMI ADININGSIH  
No. Pokok : B11112190  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Alamat : BTN Citra Sari Permai Blok B8/1

Benar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAİK (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palampang, 27 Juli 2016

  
Kepala KUA Rilau Ale  
**Ahmad Ridha, S.Ag**  
NIP. 19770801 200212 1 002